

# Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Bella Puspita Rininda<sup>1</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Airlangga, Indonesia  
Email: bellapuspininda@gmail.com

Erina Sudaryati<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Airlangga, Indonesia

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketepatan anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik, dan sistem pelaporan yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Sampel penelitian ini adalah pegawai pada SKPD Kabupaten Tanah Laut yang dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan total responden sebanyak 81 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan anggaran dan sistem pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Namun, sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja; Ketepatan Anggaran; Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik; Sistem Pelaporan.

*Effect of Budget Accuracy, Public Sector Managerial Control Systems, and Reporting Systems on Performance Accountability*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine and analyze the influence of the precision of managerial control systems, public sector, and reporting systems that allegedly influenced the performance accountability. The sample of this research was an employee of SKPD Tanah Laut Regency selected by using Purposive Sampling method with the total number of respondents as many as 81 people. The data collection of this research is used the questionnaires instrument. The data collected was analyzed by multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that the accuracy and control systems of managerial accountability to public sector performance. However, the reporting system does not influence on performance accountability in SKPD Tanah Laut Regency.*

Keywords: *Accountability For Performance; It Managerial Control Systems; The Accuracy Of The Public Sector; The Reporting System.*



E-JA  
e-Jurnal Akuntansi  
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 5  
Denpasar, Mei 2020  
Hal. 1099-1113

Artikel Masuk:  
17 Februari 2020

Tanggal Diterima:  
13 Mei 2020

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan akuntansi memberikan perhatian lebih pada semua jenis organisasi tidak terkecuali organisasi-organisasi sektor publik. Pemerintah diharapkan untuk fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja hasil. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan aturan dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban yang efektif yang biasa disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aspek akuntabilitas diakui sebagai nilai mendasar untuk pemerintahan yang baik di organisasi publik (Al-Shbail & Aman, 2018). Akuntabilitas adalah salah satu aspek utama dari organisasi publik yang memastikan berfungsinya dan meningkatkan pemantauan oleh para pemangku kepentingan utama (Al-Shbail & Aman, 2018).

Akuntabilitas merujuk pada standar atas kinerja seseorang yang didasarkan atas harapan masyarakat dan bisa digunakan untuk menilai hal penting seperti kinerja, derajat responsivitasnya, serta moralitas dari petugas yang melayani kepentingan publik (Mahsun, 2012). Akuntabilitas berfokus pada penilaian perilaku agen publik sesuai dengan serangkaian standar (Keerasuntonpong, Manowan, & Shutibhinyo, 2019). Akuntabilitas menjadi lebih penting, karena pemerintah perlu memberi tahu masyarakat tentang penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik (Brusca & Montesinos, 2016). Masyarakat memiliki hak dan wewenang untuk memperoleh informasi tentang kegiatan yang diperbuat oleh pemerintah yang seharusnya dipertanggungjawabkan, disajikan, dilaporkan, dan diungkapkan (Hutama & Yudianto, 2019).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja serta mengungkapkan pelaporannya. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban dari pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk melayani beberapa fungsi dari administrasi pada masing-masing lembaga, dan kemudian mempertanggungjawabkan serta memaparkan berhasil atau gagalnya tingkat kinerja mereka. Pengelolaan yang berakuntabilitas oleh pemerintah, tidak lepas dari anggaran, pada dasarnya, anggaran menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam administrasi holistik dan keberlangsungan urusan suatu negara (Ajibolade & Oboh, 2017).

Anggaran merupakan dokumen kebijakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan yang berisi perkiraan pemerintah tentang pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, biasanya satu tahun (Ajibolade & Oboh, 2017). Anggaran adalah instrumen ekonomi yang sangat diperlukan yang digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi dan merealisasikan agenda yang telah disetujui. Selain itu, anggaran juga harus mempunyai sifat sistematis, yaitu bahwa anggaran disusun secara berurutan dan berdasarkan logika (Herlianto, 2015). Oleh karena itu, diperlukan pengendalian oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan secara tepat sasaran sehingga penyusunan anggaran dapat terealisasi pada organisasi sektor publik.

Pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik dapat membantu mempercepat pencapaian hasil yang tepat dimana hal tersebut diinginkan oleh pemerintah. Sistem pengendalian manajerial sektor publik merupakan rancangan sistem untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terkait pada organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi. Beberapa aktivitas yang perlu

diterapkan dalam pengendalian manajerial sektor publik, diantaranya perencanaan, motivasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, pembuatan keputusan, sistem pengendalian, dan penilaian serta pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2009).

Laporan atas kinerja adalah suatu kewajiban untuk memrepresentasikan dan melaporkan seluruh kegiatan beserta sumbernya yang harus dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja (Bastian, 2010). Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) menjelaskan bahwa laporan yang tergolong baik adalah laporan yang mempunyai aspek kejujuran, objektivitas, dan transparansi. Aktivitas-aktivitas terkait peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada proses realisasi rencana anggaran diperlukan laporan umpan balik (*feedback*), sehingga proses realisasi rencana dan ketepatan sasaran anggaran dapat diketahui oleh manajemen. Dengan demikian, pelaporan kinerja yang baik adalah hal yang penting agar manajemen dapat memiliki pantauan dan pengendalian kinerja dalam implementasi anggaran dan menghasilkan data keuangan yang dilaporkan secara detail serta memperlihatkan akuntabilitas keuangan yang tinggi.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas tentang determinan atau faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Supadami (2015) mendapati hasil bahwa ketepatan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, artinya ketepatan anggaran yang meningkat dalam aktivitas perencanaan, evaluasi dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerja, sedangkan temuan Herawaty (2011) yang menyatakan bahwa kejelasan atas sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan.

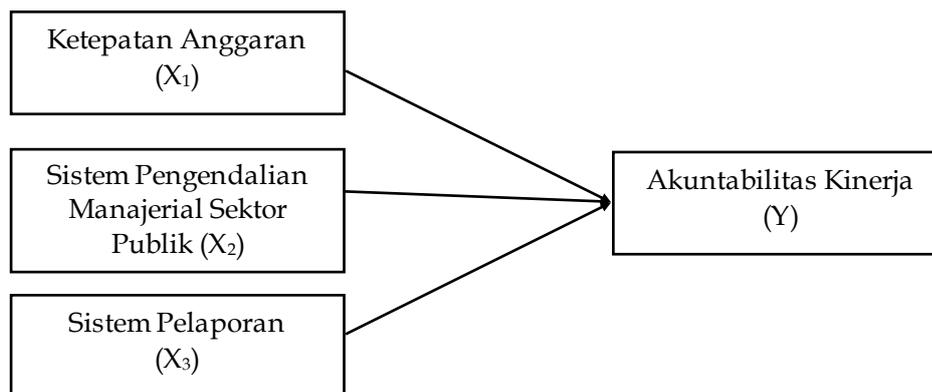
Dewi & Supadami (2015) dan Paramitha & Gayatri (2016) melakukan penelitian pada pengendalian manajerial sektor publik dan menyatakan bahwa pengendalian manajerial pada sektor publik mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja SKPD, artinya pengendalian manajerial setiap departemen setiap dinas suatu lembaga dapat meningkatkan aspek akuntabilitas kinerja SKPD. Anjarwati (2012), Herawaty (2011), dan Paramitha & Gayatri (2016) menyatakan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja SKPD, sementara itu, Heptariani.Z, Rasuli, & Taufik (2013) dan Setiawan (2019) mendapati hasil dimana sistem pelaporan tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian yang dilakukan Paramitha & Gayatri (2016) yang dilakukan di 33 SKPD Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa ketepatan anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota Pelaihari merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang. Tanah Laut sebagai pusat pemerintahan daerah didukung oleh 27 Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 mendapatkan nilai sebesar 60 dengan predikat CC dan 2018 sebesar 63,81 dengan predikat B. Tahun 2019 nilai yang diperoleh pemerintah naik 1 poin yaitu sebesar 64,89 dengan masih meraih predikat B dimana hasil ini menunjukkan kinerja

instansi Pemerintah Daerah sudah cukup baik meskipun belum sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah yaitu mendapat predikat BB. Adapun komponen yang dinilai pada evaluasi SAKIP tersebut meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Salah satu kunci peningkatan hasil evaluasi ini yakni tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory*. *Stewardship* berdasar kepada aspek manusia yaitu tingkah laku perilaku (*behavior*), model (*model of man*), dan psikologis seperti motivasi dan kekuasaan pada organisasi yang menganggap kepemimpinan sebagai hal krusial dalam pencapaian tujuannya. *Stewardship* menjelaskan bahwa manajemen tidak mempunyai tujuan-tujuan individual namun lebih mengarah pada sasaran terkait kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). *Stewardship* memungkinkan adanya Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai lembaga terpercaya dalam melakukan aktivitas terkait kepentingan publik, dan melaksanakan fungsinya untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan dengan tepat. Definisi ini sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat sebagai principal dapat mengetahui bagaimana keadaan keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut.

Secara sistematis kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Data Penelitian, 2020

Anggaran adalah sebuah pernyataan perkiraan kinerja yang ingin ditargetkan dalam satu periode tertentu dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran merupakan proses persiapan penyediaan anggaran (Mardiasmo, 2009). Adanya kejelasan dan ketepatan dalam anggaran tentunya dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau gagalnya tugas suatu organisasi sehingga memotivasi pekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dewi & Supadami (2015) dan Paramitha & Gayatri (2016) menyatakan bahwa ketepatan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya, ketepatan sasaran anggaran yang baik dalam mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Hasil berbeda ditemukan oleh Herawaty (2011) yaitu bahwa kejelasan sasaran

anggaran mempunyai pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja sektor publik.

H<sub>1</sub> : Ketepatan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut.

Pada suatu organisasi, terdapat sistem pengendalian manajerial, untuk mengajak orang lain pada suatu organisasi agar secara bersama-sama mencapai tujuan organisasi dengan penerapan strategi yang efektif dan efisien. Organisasi khususnya sektor publik dalam mencapai tujuannya, membutuhkan penerapan strategi yang efektif dan efisien, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh sistem pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2009). Paramitha & Gayatri (2016) menyatakan akuntabilitas kinerja SKPD di pengaruhi oleh sistem pengendalian manajerial sektor publik. Dewi & Supadami (2015) menyatakan dalam pengendalian manajerial aspek komunikasi sifatnya krusial dalam organisasi, baik itu komunikasi bawahan-atasan. Sistem dan komunikasi yang benar tentunya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di institusi pemerintahan daerah. Jika sistem dari pengendalian manajerialnya baik tentunya didapat peningkatan akuntabilitas kinerja oleh SKPD.

H<sub>2</sub> : Sistem pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan Fitriana *et al.* (2018), Paramitha & Gayatri (2016) dan Pratama *et al.* (2019) menemukan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap sistem pelaporan secara positif, artinya untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajerial dalam realisasi anggaran diperlukan sistem perbaikan pelaporan. Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan sistem penyusunan pelaporan yang terstruktur dan baik maka mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja di SKPD. Hasil berbeda yang ditemukan oleh Heptariani.Z *et al.* (2013) dan Setiawan (2019) yang akuntabilitas tidak dipengaruhi oleh sistem pelaporan.

H<sub>3</sub> : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut.

## METODE PENELITIAN

Populasi merupakan wilayah secara umum terdiri atas obyek maupun subjek dan mempunyai karakteristik atau kualitas tertentu kemudian peneliti pelajari, setelah itu menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). 27 Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Tanah Laut di pilih sebagai populasi dalam penelitian ini. Bagian dari karakteristik serta jumlah yang dimiliki populasi disebut sampel (Sugiyono, 2016). Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *Purposive Sampling*, dimana pemilihannya didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Pemilihan kriteria sampel

yaitu orang yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Bendahara dari tiap Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Alasan pemilihan sampel tersebut dikarenakan Kepala Dinas sebagai pemimpin dianggap orang yang paling bertanggung jawab di dalam organisasi dan mampu menggambarkan kinerja instansi pemerintah daerah secara keseluruhan. Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan orang yang menyusun anggaran keuangan di dalam organisasi. Sedangkan, Bendahara merupakan orang yang mengatur keuangan di dalam organisasi, khususnya bendahara pengeluaran karena tugas dari bendahara pengeluaran SKPD yaitu untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, serta kemudian mempertanggungjawabkan uang yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan APBD di SKPD.

Rumus slovin digunakan dalam penentuan ukuran sampel, dimana penggunaan rumus ini hanya apabila tujuan dari penelitian untuk menduga jumlah dari proporsi populasi. Tingkat keandalan dalam penelitian ini yaitu 95% dengan tingkat kesalahan 5% yang dimana dalam penelitian ini terdapat 27 SKPD dikali 3 anggota sampel untuk masing-masing SKPD sehingga jumlah populasi keseluruhan berjumlah 81 populasi.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ketepatan anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor public, serta sistem pelaporan. Variabel ketepatan anggaran ( $X_1$ ) diukur menggunakan enam proksi, antara lain: tingkat realisasi anggaran, pelaksanaan program kegiatan, pencapaian efisiensi, tingkat pelayanan kepada masyarakat, pencapaian kualitas kerja, dan pencapaian hasil atau output (Dewi & Supadami, 2015). Sistem pengendalian manajerial sektor publik ( $X_2$ ) diukur menggunakan sepuluh proksi, antara lain: visi dan misi unit kerja, kode etik pegawai, penegakkan integritas dan etika, pengawasan intern, pengendalian internal dan eksternal, penentuan batas dan penetapan toleransi resiko, identifikasi dan pengkomunikasian informasi, memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana, kemudahan informasi, dan pengawasan dalam penyusunan LAKIP (Dewi & Supadami, 2015). Sistem pelaporan ( $X_3$ ) diukur menggunakan enam proksi, antara lain: laporan disampaikan tepat waktu, obyektif, relevan, konsisten dan akurat, informasi tersedia segera ketika diminta, analisis terhadap penyimpangan-penyimpangan, laporan berbeda kepada pemakai yang berbeda, laporan tindakan korelasi, dan laporan prestasi kerja (Saprudin, 2001).

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Di SKPD Kabupaten Tanah Laut. Akuntabilitas kinerja diukur menggunakan empat proksi oleh Ellwood (1993), yaitu akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas kebijakan.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden akan menggunakan skala Likert dalam proses pengumpulan data yang diperoleh. Skala Likert 5 tingkatan yang digunakan yaitu jika mengarah pada akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi, maka skor 5 menjadi titik poin peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal sebaliknya juga terjadi jika akuntabilitas kinerja yang semakin rendah akan semakin mengarah pada skor 1 skala Likert. Seluruh variabel akan diukur menggunakan skala Likert.

Penggunaan regresi linier berganda sebagai alat analisis yaitu agar dapat melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen dengan program SPSS versi 23. Uji validitas dilakukan bertujuan agar dapat mengetahui valid atau tidak validnya kuesioner. Kuesioner akan dikatakan sah bila pernyataan dari kuesioner bisa untuk mengungkapkan variabel yang di ukur. Uji reliabilitas dilakukan agar dapat mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang dimana indikator kuesioner dinyatakan handal bila jawaban pada responden stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji asumsi-asumsi regresi linier agar dapat terhindar dari bias dalam menganalisis data serta agar terhindar dari kesalahan. Penelitian ini menggunakan model persamaan dibawah ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja
- a = *Intercept* atau Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> = Ketepatan Anggaran
- X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik
- X<sub>3</sub> = Sistem Pelaporan
- ε = *error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

No.	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
1.	Ketepatan Anggaran (X1) Sistem Pengendalian	81	20	30	24,41	2,534
2.	Manajerial Sektor Publik (X2)	81	35	49	40,96	3,348
3.	Sistem Pelaporan (X3)	81	15	28	23,36	2,763
4.	Akuntabilitas Kinerja (Y)	81	44	63	50,41	4,499

Sumber: Data Penelitian, 2020

Variabel ketepatan anggaran (X1) memiliki jumlah responden (n) sebanyak 81, memiliki nilai antara 20-30 dengan nilai mean sebesar 24,41 apabila dibagi dengan 6 pertanyaan menghasilkan 4,06. Hasil ini memberikan arti, yaitu rata-rata responden memberikan skor 4 untuk setiap pernyataan variabel ketepatan anggaran.

Sistem pengendalian manajerial sektor publik (X2) memiliki skor antara 35-49 dengan mean sebesar 40,96, apabila dibagi dengan 10 pertanyaan maka rata-rata responden memberikan skor 4 untuk setiap pernyataan variabel sistem pengendalian manajerial sektor publik.

Sistem pelaporan (X3) memiliki skor berkisar antara 15-28 dengan mean sebesar 23,36, dibagi dengan 6 pertanyaan maka rata-rata responden memberikan skor 3 dan 4 untuk setiap pernyataan variabel sistem pelaporan.

Akuntabilitas kinerja (Y) memiliki skor berkisar antara 44-63 dengan mean sebesar 50,41, dibagi dengan 13 pertanyaan menghasilkan 3,87 maka rata-

rata responden memberikan skor 3 dan 4 untuk setiap pernyataan variabel akuntabilitas kinerja.

Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan *Statistical Package for Sosial Science* versi 23. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien kolerasi  $r_{hitung}$  lebih besar dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  pada taraf signifikansinya 5%. Nilai  $r_{tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0,2185, nilai tersebut diperoleh dari *degree of freedom* ( $df$ ) =  $N - 2$  atau  $df = 81 - 2 = 79$ , nilai  $df = 79$  pada taraf signifikasi 5% ialah sebesar 0,2185. Berdasarkan hasil uji validitas semua item pertanyaan pada tiap variabel penelittian ini adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari  $r_{hitung}$  masing-masing item lebih besar dibandingkan dengan  $r_{tabel}$ .

Alat untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *cronbach alpha* lebih besar dari pada 0,7, maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Chronbach Alpha</i>	Keterangan
Ketepatan Anggaran ( $X_1$ )	0,703	Reliabel
Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik ( $X_2$ )	0,715	Reliabel
Sistem Pelaporan ( $X_3$ )	0,703	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,738	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2020

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam menentukan apakah sampel berdistribusi normal atau tidak yaitu jika nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka sampel dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka sampel dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tebel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,504	Sebaran data berdistribusi normal

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 3., hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat dilihat nilai *Monte Carlo. Sig (2-tailed)* sebesar 0,504 lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa persebaran data yang diolah dalam penelitian ini berdistribusi secara normal sehingga menunjukkan syarat model regresi yang baik karena sudah memenuhi syarat asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$

(Ghozali, 2016). Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ketepatan Anggaran ( $X_1$ )	0,534	1,871	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik ( $X_2$ )	0,587	1,704	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sistem Pelaporan ( $X_3$ )	0,856	1,169	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa pada nilai *tolerance*, baik variabel  $X_1$ , variabel  $X_2$ , dan variabel  $X_3$ , lebih besar dari 0,10 begitu pula pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) memperlihatkan kondisi masing-masing variabel  $X_1$ , variabel  $X_2$ , dan variabel  $X_3$  berada pada nilai kurang dari 10, atas dasar hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Menurut Ghozali (2016, P.138) menyatakan model regresi dapat dikatakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansinya tingkat kepercayaan 5%. Hasil pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Ketepatan Anggaran ( $X_1$ )	0,664	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik ( $X_2$ )	0,931	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Pelaporan ( $X_3$ )	0,628	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2020

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Gletsjer* menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan tingkat signifikansi seluruh variabel bebas diatas 5% atau 0,05.

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis apakah ditolak atau diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan nilai *p value* < 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen selain memperhatikan tingkat signifikansi, berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen juga dapat dilihat dari nilai *t*, yaitu nilai  $t_{hitung}$  harus lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini diperoleh dengan nilai *df* sebesar 81 (81-4-1) = 76 dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 1.992. Hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini:

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	B	T	Sig.	Hasil Pengujian	Hipotesis
Konstanta	0,462	1,072	0,287		
Ketepatan Anggaran	0,243	3,145	0,002	Berpengaruh	H <sub>1</sub> diterima
Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik	0,593	6,393	0,000	Berpengaruh	H <sub>2</sub> diterima
Sistem Pelaporan	-0,001	-0,009	0,993	Tidak Berpengaruh	H <sub>3</sub> ditolak

*Adjusted R Square* = 0,622  
Sig. Uji Model (Uji F) = 0,000

Sumber: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 6, maka model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 0,462 + 0,243X_1 + 0,593X_2 - 0,001X_3 + \varepsilon$$

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Ukuran untuk menilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R square*. Nilai tersebut digunakan untuk menjelaskan seberapa besar variasi variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen dalam model regresi berganda yang jumlah variabel independennya lebih dari dua. Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini nilai *adjusted R square* sebesar 0,622 atau 62,2% yang berarti variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh variabel independen yakni ketepatan anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik dan sistem pelaporan sedangkan 37,8% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah suatu model penelitian yang dilakukan layak untuk diteliti, apabila hasil tidak signifikan atau lebih besar dari 0,05 ( $>0,05$ ) maka tidak disarankan untuk melakukan uji statistik t. Oleh sebab itu uji statistik F diperlukan untuk menguji kelayakan suatu model. Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 0,000, yang berarti uji statistik F menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk diteliti.

Untuk menguji hipotesis secara signifikan digunakan uji t, yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel terhadap variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai signifikansi. Penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t berdasarkan pada kriteria jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$ , maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$ ,

maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bukti empiris pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan koefisien regresi ketepatan anggaran yaitu 0.243 dimana arah hubungan positif dan tingkat signifikansinya 0.002 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan ( $\alpha$ ) 5% ( $0.002 < 0.05$ ). Hasil menjelaskan variabel ketepatan anggaran memiliki pengaruh pada akuntabilitas kinerja. Berdasarkan dari hasil jawaban responden, sebagian besar responden memberikan respon positif atau sangat setuju dalam pernyataan yang diberikan. Hal tersebut berarti bahwa variabel ketepatan anggaran telah berjalan dengan optimal pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Hal ini didukung dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mengoptimalkan anggaran dengan melakukan pemangkasan program yang tidak tepat sasaran serta dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi. Pemerintah memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Ajibolade & Oboh (2017) menyatakan bahwa pengelolaan yang berakuntabilitas oleh pemerintah, tidak lepas dari anggaran, pada dasarnya, anggaran menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam administrasi holistik dan keberlangsungan urusan suatu negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Supadami (2015) dan Paramitha & Gayatri (2016) dimana hasilnya menyatakan ketepatan anggaran mempunyai pengaruh positif pada akuntabilitas kinerja.

Hipotesis kedua menunjukkan nilai dari koefisien regresi dari sistem pengendalian manajerial sektor publik yaitu 0.593 dan menunjukkan arah hubungan positif dimana tingkat signifikansinya 0.000 yang tentunya lebih kecil dari tingkatan signifikansi 5% ( $0.000 < 0.05$ ) yang berarti sistem pengendalian manajerial sektor publik memiliki pengaruh dengan akuntabilitas kinerja SKPD di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan dari hasil jawaban responden, sebagian besar responden memberikan respon positif dalam pernyataan yang diberikan. Hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian manajerial sektor publik telah berjalan secara optimal pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Hasil ini sesuai dengan keadaan bahwa kegiatan dilapangan telah berjalan dengan baik, dimana para pegawai eselon II, eselon III dan eselon IV saling bahu membahu agar terciptanya sistem pengendalian manajerial yang baik. Salah satu cara yang dilakukan agar terciptanya akuntabilitas yaitu pemerintah Kabupaten Tanah Laut fokus dengan menerapkan *E-Government* yang mana terbagi menjadi tiga yaitu, *E-Planning*, *E-Budgetting* dan *E-Monev*. Dengan *E-Government* tersebut maka pemerintah sangat transparan dengan masyarakat, sehingga semua masyarakat bisa melihat secara langsung melalui website atau aplikasi perencanaan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi dapat diakses langsung oleh masyarakat luas (Hanafi, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Supadami (2015) juga Paramitha & Gayatri (2016) menyatakan kalau akuntabilitas kinerja dipengaruhi sistem pengendalian manajerial sektor publik secara signifikan dan positif.

Hipotesis ketiga menampakkan besaran koefisien regresi berganda variabel sistem pelaporan yaitu -0,001 dan menunjukkan arah hubungan negatif

yang mana signifikansinya 0.993 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai taraf signifikan ( $\alpha$ ) 5% ( $0.993 < 0.05$ ). Hasil menyatakan sistem pelaporan tidak terdapat pengaruh dengan akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut. Tidak berpengaruhnya sistem pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu menjadi sebuah perhatian, sebab dalam rangka mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan perlu untuk meningkatkan, mengawasi, serta melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan agar sesuai dengan harapan masyarakat dan organisasi. Tidak berpengaruhnya variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja didasarkan sesuai dengan fakta dilapangan bahwa variabel sistem pelaporan tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal, dimana pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan sistem pelaporan yang tersedia pada SKPD Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan hasil evaluasi SAKIP yang diperoleh pada komponen pelaporan kinerja, dimana komponen pelaporan kinerja hanya memperoleh skor 9,94 dari bobot 15. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anjarwati (2012), Herawaty (2011), dan Paramitha & Gayatri (2016) yang menyatakan kalau akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh sistem pelaporan secara positif serta signifikan.

## SIMPULAN

Pesatnya perkembangan akuntansi sektor publik saat ini memerlukan perhatian lebih terhadap praktik akuntansi. Dimana, akuntabilitas menjadi salah satu alat untuk memberikan kepercayaan kepada publik untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan erat dengan anggaran, karena anggaran merupakan instrumen ekonomi yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan pemerintahan. Selain itu, sistem pengendalian yang baik juga diperlukan untuk membantu agar pihak-pihak terkait berperilaku berdasarkan tujuan organisasi, demi tercapainya hasil yang diharapkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan sistem pelaporan kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian menyatakan ketepatan anggaran memiliki pengaruh dengan akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut, yang artinya setiap meningkatnya ketepatan anggaran baik itu dari segi perencanaan, evaluasi maupun setiap tindakan dalam kegiatan maka akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Tanah Laut akan meningkat. Begitu juga dengan sistem pengendalian manajerial sektor publik yang memiliki pengaruh dengan akuntabilitas kinerja pada SKPD Kabupaten Tanah Laut yang berarti tiap pencapaian kendali manajerial mengalami peningkatan maka akuntabilitas kinerja SKPD di Kabupaten Tanah Laut juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, hasil uji dari hipotesis ketiga menjelaskan kalau sistem pelaporan tidak mempunyai pengaruh dengan akuntabilitas kinerja di SKPD Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut disebabkan dimana sistem pelaporan yang tersedia dan diterapkan oleh pemerintah belum mampu berjalan dengan maksimal, padahal didalam mengendalikan atau memantau kinerja pemerintah serta mengetahui implementasi dari anggaran diperlukan sistem pelaporan yang baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, peneliti berikutnya sebaiknya meneliti seluruh SKPD Kabupaten Tanah Laut termasuk Kecamatan

sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan dalam menjalankan sistem pelaporan dengan cara secara bersama-sama melakukan perbaikan terhadap sistem pelaporan, seperti menempatkan pekerja yang mempunyai pengetahuan yang cukup memadai dalam penyusunan pelaporan keuangan, serta melakukan pengawasan secara optimal terhadap penyajian sistem pelaporan agar penyajian laporan keuangan minim dari kesalahan serta laporan keuangan yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya.

## REFERENSI

- Ajibolade, S. O., & Oboh, C. S. (2017). A critical examination of government budgeting and public funds management in Nigeria. *International Journal of Public Leadership*, 13(4), 218-242. <https://doi.org/10.1108/ijpl-11-2016-0045>
- Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems: Indonesian local government under pressure. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 12(1), 3-33. <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013>
- Al-Shbail, T., & Aman, A. (2018). E-government and accountability: How to mitigate the disorders and dysfunctions of accountability relationships. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 12(2), 155-190. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0057>
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Anthony, R. N., Dearden, J., & Bedford, N. M. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2016). Implementing Performance Reporting in Local Government: A Cross-countries Comparison. *Public Performance and Management Review*, 39(3), 506-534. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1137768>
- Darman, & Baharuddin, A. (2015). The Effect of Budgetary Participation, Budget Goal Clarity, Decentralized Structure, and Public Accountability on the Performance of Regional Work Units (SKPD) at Gowa District, Sulawesi Selatan. *Scientific Research Journal*, III(X), 22-30.
- Dewi, M. A. P., & Supadami, N. L. (2015). Pengaruh Ketepatan Anggaran Dan Pengendalian Manajerial Sektor Publik Pada Akuntabilitas Kinerja Skpd. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(1), 50-63.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ellwood, S. (1993). Parish and town councils: Financial accountability and management. *Local Government Studies*, 19(3), 368-386. <https://doi.org/10.1080/03003939308433687>
- Elwood, B. (2005). *Manajemen Produksi*. Jakarta: Erlangga.
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Kejelasan Sasaran

- Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 07(02), 91-103.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, I. (2019). Pemkab Tanah Laut evaluasi SAKIP. Retrieved from <https://kalsel.antaranews.com/berita/132395/pemkab-tanah-laut-evaluasi-sakip>
- Heptariani, Z. S., Rasuli, M., & Taufik, T. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau). *Jurnal Sorot*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.31258/sorot.8.1.2349>
- Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 13(2), 31-36.
- Herlianto, D. (2015). *Anggaran Keuangan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hutama, R. S., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Budget Participation, Budget Goals Clarity and Internal Control Systems Implementation on Local Government Performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i2.22640>
- Ibrahim. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ikhsan, A., Lesmana, S., & Hayat, A. (2015). *Teori Akuntansi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Keerasuntonpong, P., Manowan, P., & Shutibhinyo, W. (2019). Reforming government public accountability: the case of Thailand. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(2), 237-263. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2018-0051>
- Lina, & Stella. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial : Kepuasan Kerja Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(1), 37-56.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munandar, M. (2000). *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFPE.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ompusunggu, K. B., & Bawono, I. R. (2006). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Job Relevant Information (Jri) Terhadap Informasi Asimetris. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. <https://doi.org/10.34010/jra.v6i2.517>
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2457-2479.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi,

- Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429-444.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rasul, S. (2007). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Riduan. (2010). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Tirtayasa Ekonomika*, 14(2), 204. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>
- Suadi, A. (2006). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumarno, J. (2005). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis Strategi*.
- Tyer, C., & Willand, J. (1997). Public budgeting in America: a twentieth century retrospective. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 9(2), 189-219. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-09-02-1997-b001>